



Analisis Ketimpangan Sosial di Tengah Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Alfin Miftahul Akmal¹, Cintia Putri Peayogha², Fernanda Septianayla Putri³, Tanadda Shidqi⁴

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email :

alfinmiftahu936@gmail.com , kreativechinoy@gmail.com , fernandaseptianaylaputri@gmail.com ,
shidqitanadda@gmail.com

Diterima: 13-06-2026 | Disetujui: 17-06-2026 | Diterbitkan: 19-06-2026

ABSTRACT

Economic growth is widely recognized as a fundamental indicator for assessing the success of a country's development process. Nevertheless, an increase in economic growth does not necessarily guarantee an equitable distribution of welfare across society. This situation may give rise to social inequality, which is reflected in disparities in income levels, access to education, healthcare services, and economic opportunities among different social groups. This study aims to examine social inequality in the context of economic growth and to analyze the issue from the perspective of Islamic economics. The discussion is grounded in theories of economic growth, social inequality, and wealth distribution within the framework of Islamic economics. This research adopts a qualitative approach through a literature review methodology. The data were collected from various secondary sources, including scientific journals, academic books, scholarly articles, and other relevant documents. The findings reveal that economic growth alone is insufficient to reduce social inequality unless it is accompanied by a fair and balanced distribution of welfare. From the standpoint of Islamic economics, social inequality can be alleviated through the application of distributive justice principles and the effective utilization of Islamic economic instruments, such as zakat, infaq, sadaqah, and waqf. Therefore, Islamic economics provides a comprehensive framework for promoting equitable, inclusive, and sustainable economic growth.

Keywords: Social inequality, economic growth, Islamic economics, wealth distribution, Islamic macroeconomics.

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Namun demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial yang tercermin dalam perbedaan tingkat pendapatan, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan ekonomi antarkelompok masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena ketimpangan sosial yang terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi serta mengkajinya berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Analisis penelitian disusun dengan mengacu pada teori pertumbuhan ekonomi, ketimpangan sosial, dan konsep distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui penelaahan berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel

akademik, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis mampu mengurangi ketimpangan sosial apabila tidak didukung oleh distribusi kesejahteraan yang adil dan merata. Dalam perspektif ekonomi Islam, ketimpangan sosial dapat diminimalkan melalui penerapan prinsip keadilan distributif serta optimalisasi instrumen ekonomi Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Oleh karena itu, ekonomi Islam menawarkan kerangka yang komprehensif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ketimpangan sosial, pertumbuhan ekonomi, ekonomi Islam, distribusi kesejahteraan, makroekonomi syariah.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Akmal, A. M., Peayogha, C. P. ., Putri, F. S. ., & Shidqi, T. . (2026). Analisis Ketimpangan Sosial di Tengah Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Indonesia Economic Journal*, 2(1), 1544-1554. <https://doi.org/10.63822/4ysmhw50>

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan di suatu negara. Kenaikan pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan dalam aktivitas produksi, investasi, dan pendapatan masyarakat. Secara teori, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan perluasan akses terhadap layanan publik yang beragam. Namun, dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu diiringi dengan pemerataan kesejahteraan, sehingga muncullah ketimpangan sosial di berbagai lapisan masyarakat.

Fenomena ketimpangan sosial merupakan salah satu tantangan besar dalam pembangunan ekonomi modern. Ketimpangan sosial dapat dilihat dari perbedaan pendapatan, kepemilikan aset, akses pendidikan, akses kesehatan, serta kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Walaupun suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang tergolong tinggi, tidak semua kelompok masyarakat merasakan manfaat yang setara dari proses pembangunan tersebut. Akibatnya, sebagian masyarakat menikmati peningkatan kesejahteraan yang signifikan, sementara kelompok lain masih berhadapan dengan berbagai keterbatasan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, masalah ketimpangan sosial masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. Pertumbuhan ekonomi yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir belum sepenuhnya berhasil mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan maupun antar wilayah. Keadaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat hanya diukur berdasarkan peningkatan produk domestik bruto, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek distribusi hasil pembangunan agar manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh semua lapisan masyarakat.

Perspektif ekonomi Islam memberikan sudut pandang yang berbeda dalam melihat pembangunan ekonomi. Dalam Islam, fokus tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi serta kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama. Dalam konteks ekonomi Islam, kekayaan dianggap sebagai tanggung jawab yang harus dikelola dengan bijaksana dan dibagikan secara adil. Prinsip ini dapat dilihat dalam berbagai alat ekonomi Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang bertujuan untuk mendukung penyebaran kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial.

Di sisi lain, ekonomi Islam menentang praktik yang dapat menyebabkan akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu. Al-Qur'an menegaskan bahwa harta seharusnya tidak hanya berhenti di kalangan orang-orang kaya, melainkan harus memberikan keuntungan bagi masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, konsep distribusi di dalam ekonomi Islam memiliki peranan penting dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Dari penjelasan tersebut, analisis mengenai ketidaksetaraan sosial di tengah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksetaraan sosial serta menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip dan instrumen ekonomi Islam dapat berperan dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan tinjauan pustaka. Pendekatan kualitatif diambil karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan

menginterpretasikan fenomena ketidaksetaraan sosial dalam konteks pertumbuhan ekonomi dengan perspektif ekonomi Islam secara rinci. Metode ini tidak menitikberatkan pada analisis statistik, tetapi lebih kepada pemahaman mengenai konsep, teori, dan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya.

Tinjauan pustaka dipilih karena topik penelitian berkaitan erat dengan kajian konseptual dan teoritis, sehingga memerlukan analisis dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Dengan pendekatan ini, peneliti mampu mengidentifikasi keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan ketidaksetaraan sosial serta mengeksplorasi bagaimana ekonomi Islam bisa memberikan solusi terhadap isu-isu tersebut. Selain itu, metode ini memberi kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh pemahaman yang holistik berdasarkan berbagai sudut pandang akademis yang telah berkembang.

Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diambil dari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber data terdiri dari jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, buku-buku akademis, artikel ilmiah, prosiding, laporan penelitian, serta dokumen resmi yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi, ketidaksetaraan sosial, dan ekonomi Islam. Literatur yang dipilih diutamakan berasal dari sumber-sumber yang terpercaya, terkini, dan memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam studi ini dilaksanakan melalui penelitian pustaka. Penelitian pustaka adalah metode pengumpulan data yang melibatkan identifikasi, pengumpulan, pembacaan, serta analisis berbagai referensi yang berkaitan dengan subjek penelitian. Proses pengumpulan data dimulai dengan mencari literatur melalui basis data akademik, seperti Google Scholar, Garuda, ScienceDirect, dan sumber ilmiah lainnya.

Setelah itu, literatur yang berhasil dikumpulkan diseleksi berdasarkan relevansi tema, kualitas sumber, serta kesesuaian dengan tujuan penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan menurut tema-tema yang dibahas, seperti konsep pertumbuhan ekonomi, ketidaksetaraan sosial, prinsip distribusi dalam ekonomi Islam, dan peran instrumen ekonomi Islam dalam mengurangi kesenjangan sosial. Tahapan ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang terstruktur dan mendukung analisis studi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilaksanakan dengan memanfaatkan teknik analisis deskriptif yang bersifat kualitatif. Informasi yang diperoleh dari berbagai referensi kemudian dianalisis melalui beberapa langkah, mulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Pada langkah reduksi data, peneliti melakukan seleksi dan fokus pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian yang ada. Selanjutnya, data disajikan dalam format naratif yang terstruktur untuk mempermudah proses interpretasi.

Langkah terakhir mencakup penarikan kesimpulan berdasarkan hasil tinjauan terhadap berbagai teori dan penelitian sebelumnya. Analisis dilakukan dengan membandingkan sejumlah pandangan yang berhubungan dengan ketidakadilan sosial dan perkembangan ekonomi, lalu melakukan kajian berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai penyebab ketidakadilan sosial serta alternatif solusi yang ditawarkan melalui ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Ekonomi Islam terhadap Ketimpangan Sosial

Ketidaksetaraan sosial merupakan salah satu isu yang terus menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi. Walaupun angka pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan dalam kegiatan produksi, investasi, dan pendapatan masyarakat, kenyataannya hasil dari pertumbuhan tersebut tidak selalu dirasakan oleh semua kalangan. Sebagian dari masyarakat dapat menikmati peningkatan taraf hidup yang cukup signifikan, sementara yang lain masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, maupun sumber daya ekonomi yang produktif. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan pemerataan kesejahteraan.

Dalam pandangan ekonomi Islam, tujuan pembangunan ekonomi tidak hanya terfokus pada peningkatan pendapatan dan kekayaan, tetapi juga pada pencapaian keadilan sosial serta kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Ekonomi Islam melihat aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya dinilai dari pencapaian indikator ekonomi seperti pertumbuhan produk domestik bruto atau peningkatan pendapatan per kapita, tetapi juga dari kemampuan sistem ekonomi untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif.

Islam mengakui hak setiap individu untuk memiliki, mengelola, dan mengembangkan kekayaan. Namun, hak tersebut tidak bersifat mutlak, karena setiap harta membawa tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi. Dalam pandangan Islam, kekayaan adalah amanah dari Allah Swt. yang penggunaannya harus memberikan manfaat tidak hanya bagi pemiliknya, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, Islam menolak segala bentuk aktivitas ekonomi yang dapat menimbulkan ketidakadilan, eksploitasi, monopoli, atau penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu.

Ketidakadilan sosial dalam sistem ekonomi Islam dianggap sebagai situasi yang dapat mengganggu terciptanya keseimbangan hidup dalam masyarakat. Jarak yang terlalu jauh antara kelompok yang kaya dan yang miskin dapat memunculkan berbagai masalah sosial, seperti bertambahnya jumlah orang miskin, rendahnya mobilitas sosial, serta berkurangnya peluang masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam jangka panjang, keadaan ini bisa menjadi penghalang bagi pencapaian tujuan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan demikian, ekonomi Islam sangat menitikberatkan pada aspek distribusi kekayaan sebagai salah satu usaha untuk memelihara keseimbangan sosial dan ekonomi.

Prinsip keadilan merupakan salah satu pilar penting dalam ekonomi Islam. Keadilan yang dimaksud tidak berarti setiap individu harus memiliki kekayaan yang sama, tetapi setiap orang mendapatkan kesempatan yang setara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan mengakses sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, perbedaan dalam pendapatan masih bisa dipahami selama tidak menyebabkan ketidakadilan yang berlebihan dan tidak menghalangi masyarakat dari mendapatkan kehidupan yang layak.

Ekonomi Islam juga menekankan signifikansi distribusi kekayaan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Distribusi yang efektif akan membantu mengurangi jurang ekonomi dan memperluas manfaat pembangunan kepada semua golongan masyarakat. Di sisi lain, jika kekayaan hanya terfokus pada kelompok tertentu, ketidakadilan sosial akan semakin meningkat. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tetapi juga memberikan keuntungan kepada kelompok masyarakat yang memerlukan. Oleh karena itu, distribusi kekayaan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam.

Selain menekankan distribusi, ekonomi Islam juga berupaya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi dianggap penting karena dapat memperbesar kapasitas produksi, membuka peluang kerja, dan mendorong kenaikan pendapatan masyarakat. Akan tetapi, pertumbuhan tersebut harus didukung oleh kebijakan dan mekanisme yang menjamin bahwa hasil dari pembangunan dapat dinikmati secara adil. Dengan kata lain, ekonomi Islam tidak hanya fokus pada pertumbuhan saja, tetapi juga pada kualitas distribusi hasil pertumbuhan tersebut.

Dalam hal ketimpangan sosial, ekonomi Islam mempersempit pendekatan yang lebih menyeluruh karena tidak hanya bergantung pada mekanisme pasar untuk mendistribusikan kekayaan. Sistem ekonomi Islam mengintegrasikan peran individu, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan. Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang menyokong pemerataan ekonomi, sementara masyarakat diajak untuk aktif berkontribusi dalam membantu kelompok yang membutuhkan melalui beragam instrumen sosial yang diatur dalam syariat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah ketimpangan sosial memerlukan partisipasi dari berbagai pihak, tidak sekadar mengandalkan pertumbuhan ekonomi belaka.

Ekonomi Islam berpendapat bahwa kesejahteraan tidak hanya terhubung dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, tujuan akhir pembangunan dalam konteks ekonomi Islam bukan hanya peningkatan kekayaan, melainkan pelaksanaan kehidupan yang adil, seimbang, dan bermartabat untuk seluruh masyarakat. Pandangan ini memberikan sudut pandang bahwa pembangunan ekonomi seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, bukan hanya pada peningkatan angka-angka ekonomi semata.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa ketidaksetaraan sosial dalam sudut pandang ekonomi Islam adalah masalah yang perlu diatasi dengan menerapkan prinsip keadilan, meratakan kesempatan, dan mengatur distribusi kekayaan secara adil. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat dianggap memadai jika masih ada jurang yang besar dalam masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi sebagai salah satu faktor kunci untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dengan menggabungkan nilai-nilai moral, tanggung jawab sosial, serta pemerataan ekonomi, sistem ekonomi Islam memberikan cara pandang yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan untuk seluruh anggota masyarakat.

Peran Instrumen Ekonomi Islam dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial

Ketidaksetaraan sosial yang tampak di tengah pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwa lonjakan kegiatan ekonomi belum sepenuhnya berhasil dalam mewujudkan distribusi kesejahteraan yang adil. Dalam situasi ini, ekonomi Islam menyediakan berbagai alat yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai cara untuk mendistribusikan kekayaan dengan tujuan menciptakan keadilan sosial. Berlawanan dengan sistem ekonomi tradisional yang lebih berorientasi pada mekanisme pasar, ekonomi Islam menggabungkan aspek ekonomi dan sosial melalui instrumen yang dirancang untuk mengecilkan kesenjangan antara kelompok berpunya dan mereka yang berada dalam kebutuhan.

Salah satu alat penting dalam ekonomi Islam adalah zakat. Zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang telah memenuhi kriteria tertentu. Adanya zakat memainkan peran signifikan dalam menciptakan distribusi pendapatan yang lebih seimbang, karena sejumlah kekayaan dari kelompok yang mampu dialokasikan untuk mereka yang berhak menerimanya. Dengan cara ini, zakat tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar warga miskin, tetapi juga membantu meningkatkan daya

beli dan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, zakat dianggap sebagai alat yang memiliki peran penting dalam mengurangi ketidaksetaraan sosial dan memperkuat kesejahteraan komunitas.

Dalam ranah pertumbuhan ekonomi, zakat berperan bukan hanya sebagai bantuan konsumsi, tetapi juga mempunyai potensi untuk berkembang menjadi zakat yang produktif. Distribusi zakat dengan cara produktif dilakukan melalui penyediaan modal untuk usaha, pelatihan keterampilan, serta berbagai inisiatif pemberdayaan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kemandirian penerima zakat. Metode ini memberikan hasil yang lebih berkelanjutan karena para penerima zakat tidak hanya menerima bantuan sementara, tetapi juga mendapatkan peluang untuk memperbaiki kualitas hidup Mereka melalui aktivitas ekonomi yang produktif. Dalam hal ini, zakat dapat berfungsi sebagai alat yang mampu mengubah status penerima bantuan dari mereka yang bergantung pada dukungan menjadi mereka yang dapat menyumbang untuk perekonomian.

Selain zakat, instrumen lain yang berperan signifikan dalam mengurangi ketidaksetaraan sosial adalah infak dan sedekah. Kedua instrumen ini bersifat sukarela dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam membantu kelompok yang membutuhkan. Infak dan sedekah tidak terikat oleh syarat nisab atau waktu tertentu, sehingga dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Kemudahan ini menjadikan infak dan sedekah sebagai alat yang efektif dalam memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kepedulian terhadap orang lain.

Peran infak dan sedekah lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan bagi masyarakat dengan keadaan ekonomi kurang baik, tetapi juga berfungsi untuk mendukung beragam program sosial dan ekonomi. Dana yang diperoleh dari infak dan sedekah bisa digunakan untuk membantu biaya pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan sarana umum, hingga pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Dengan demikian, infak dan sedekah memiliki kontribusi yang signifikan dalam menciptakan distribusi kesejahteraan yang merata serta memperkuat ketahanan sosial di kalangan masyarakat. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, alat ini juga bisa menjadi sebuah cara untuk membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko sosial dan ekonomi.

Alat lain yang memiliki potensi besar untuk mengurangi ketimpangan sosial adalah wakaf. Seringkali, wakaf dipahami hanya sebagai pemberian tanah untuk membangun masjid atau lembaga pendidikan. Namun, seiring waktu, wakaf dapat dikelola secara produktif untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Wakaf yang berbasis produktivitas memungkinkan aset yang diwakafkan dikelola dalam aktivitas yang menghasilkan pendapatan, yang kemudian digunakan untuk kepentingan sosial serta pemberdayaan komunitas. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf bisa menjadi sumber pembiayaan yang berkelanjutan untuk berbagai program pembangunan sosial dan ekonomi.

Keunggulan wakaf terletak pada orientasinya yang jangka panjang. Jika zakat lebih berfokus pada redistribusi pendapatan dalam jangka waktu pendek hingga menengah, maka wakaf berkontribusi pada penciptaan aset produktif yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Melalui pengembangan wakaf yang produktif, masyarakat dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, serta fasilitas publik lainnya. Kondisi ini pada gilirannya akan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Keefektifan instrumen ekonomi Islam dalam menanggulangi ketidaksetaraan sosial sangat tergantung pada baiknya pengelolaannya. Pengelolaan yang dilakukan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi elemen kunci untuk memastikan dana yang terkumpul dapat disalurkan dengan tepat dan membawa manfaat maksimal untuk masyarakat. Maka dari itu, penguatan

lembaga yang mengelola zakat dan wakaf menjadi langkah penting dalam meningkatkan kinerja instrumen ekonomi Islam dalam mempercepat pemerataan kesejahteraan. Di samping itu, penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dan cakupan penghimpunan serta penyaluran dana sosial Islam.

Secara keseluruhan, instrumen ekonomi Islam memiliki fungsi yang sangat vital dalam mengurangi ketidaksetaraan sosial di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi. Zakat bertindak sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, infak dan sedekah memperkuat ikatan sosial, sedangkan wakaf berperan dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Jika seluruh instrumen ini dikelola dengan baik, maka ekonomi Islam tidak hanya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mewujudkan pemerataan kesejahteraan serta keadilan sosial untuk semua golongan masyarakat. Dengan cara demikian, instrumen ekonomi Islam dapat menjadi alternatif yang relevan dalam menghadapi isu ketidaksetaraan sosial di era pembangunan ekonomi yang modern.

Implikasi Kebijakan Makroekonomi Syariah

Kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama dalam pengembangan ekonomi makro syariah. Berbeda dengan pendekatan yang fokus pada pertumbuhan saja, ekonomi Islam menyoroti pentingnya keadilan dalam distribusi, pengurangan angka kemiskinan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi tidak hanya harus berfokus pada peningkatan kegiatan produksi dan investasi, melainkan juga harus berupaya mengurangi kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Ketidaksetaraan sosial yang terus berlanjut dapat menjadi tanda bahwa distribusi dari hasil pembangunan belum berjalan secara maksimal, sehingga mendesak diformulasikannya kebijakan yang lebih merata dan berkeadilan.

Salah satu implikasi signifikan dari penelitian ini adalah pentingnya memperkuat kebijakan distribusi kekayaan di dalam sistem ekonomi negara. Distribusi kekayaan yang adil dapat berkontribusi pada terciptanya keseimbangan dalam ekonomi dan mengurangi perbedaan pendapatan di antara berbagai kelompok masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, distribusi tidak hanya dilakukan melalui mekanisme pasar, namun juga menggunakan instrumen sosial yang telah ditetapkan dalam syariat. Dengan demikian, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih dalam pengelolaan dan pengembangan instrumen ekonomi Islam agar bisa berfungsi dengan optimal dalam mendukung pemerataan kesejahteraan.

Optimalisasi pengelolaan zakat merupakan salah satu tindakan yang dapat diambil untuk memperkuat kebijakan ekonomi makro syariah. Zakat memiliki kemampuan yang besar sebagai alat untuk redistribusi pendapatan karena mengalihkan sebagian dari kekayaan kelompok yang mampu kepada mereka yang membutuhkan. Jika dikelola secara profesional dan terintegrasi dengan program pembangunan nasional, zakat dapat membantu menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan berbagai lembaga zakat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia.

Di samping zakat, wakaf juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang adil. Wakaf produktif dapat bertindak sebagai sumber pendanaan alternatif untuk berbagai program sosial dan ekonomi, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan usaha kecil, serta pengembangan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pemanfaatan wakaf secara produktif tidak hanya membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi beban pembiayaan pemerintah dalam menyediakan layanan publik. Karena itu, penguatan

kelembagaan wakaf dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai wakaf produktif harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi syariah.

Temuan dari studi ini juga menunjukkan betapa pentingnya memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Ketidaksamaan sosial sering kali terjadi akibat adanya variasi dalam peluang untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, modal usaha, dan akses terhadap layanan finansial. Dalam hal ini, kebijakan makroekonomi syariah harus difokuskan pada upaya memperluas kesempatan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki pendapatan rendah. Penyediaan pembiayaan syariah yang bisa diakses dengan mudah oleh usaha mikro, kecil, dan menengah bisa menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus menurunkan kesenjangan pendapatan.

Lembaga keuangan syariah juga memiliki peranan penting dalam mendukung pemerataan ekonomi. Selama ini, lembaga keuangan syariah tidak hanya berperan sebagai perantara dalam finansial, tetapi juga memiliki kewajiban sosial untuk mendukung pembangunan yang adil. Melalui beragam produk pembiayaan yang berbasis pada bagi hasil, lembaga keuangan syariah dapat membantu masyarakat mendapatkan akses terhadap modal usaha tanpa harus terbebani oleh sistem bunga. Dengan cara ini, eksistensi lembaga keuangan syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan memberi kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Di sisi lain, pemerintah harus memperkuat kebijakan yang mendukung peningkatan mutu sumber daya manusia. Pendidikan dan keterampilan merupakan elemen krusial yang mempengaruhi kemampuan komunitas dalam memanfaatkan kesempatan ekonomi. Ketika akses terhadap pendidikan serta pelatihan kerja tidak merata, kesenjangan sosial akan semakin sulit diatasi. Oleh karena itu, investasi di bidang pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kapasitas masyarakat harus menjadi komponen dari strategi pembangunan ekonomi syariah yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan.

Kebijakan pembangunan daerah juga perlu memperhatikan aspek pemerataan ekonomi. Ketimpangan sosial sering kali dipengaruhi oleh variasi tingkat pembangunan di antar wilayah. Daerah yang memiliki infrastruktur, investasi, dan fasilitas umum yang lebih baik cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dibanding wilayah yang tertinggal. Dalam konteks ekonomi Islam, pembangunan diharapkan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa memandang lokasi geografis. Oleh karena itu, kebijakan pemerataan pembangunan antar daerah harus terus diperkuat agar kesenjangan ekonomi antar wilayah dapat diminimalkan.

Selain dimensi ekonomi, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral dan etika juga memainkan peran penting dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Ekonomi Islam menekankan pentingnya tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap sesama, dan pemanfaatan harta untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu, kebijakan makroekonomi syariah tidak hanya harus berfokus pada pencapaian target ekonomi, tetapi juga perlu mendorong perkembangan budaya berbagi, solidaritas sosial, dan perhatian kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Nilai-nilai tersebut bisa menjadi pijakan dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengurangi ketidakadilan sosial diperlukan strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang substansial harus diimbangi dengan langkah-langkah distribusi yang adil, penguatan alat-alat ekonomi Islam, peningkatan akses terhadap ekonomi, serta peningkatan kualitas manusia. Dalam konteks makroekonomi syariah, semua kebijakan tersebut harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil.

Oleh karena itu, pengembangan ekonomi tidak hanya berkontribusi pada peningkatan penghasilan masyarakat, namun juga dapat menciptakan kehidupan sosial yang lebih sejahtera, harmonis, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Dalam perspektif ekonomi Islam, ketimpangan sosial dipandang sebagai permasalahan perlu diatasi melalui penerapan prinsip keadilan distributif. Ekonomi Islam bukan sekedar fokus perubahan ekonomi, melainkan menempatkan distribusi adil sebagai tujuan utama pembangunan. Konsep distribusi kekayaan yang adil menjadi karakteristik sistem ekonomi Islam dalam mewujudkan keseimbangan antara individu dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya makroekonomi syariah, khususnya terkait hubungan antara pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan kesejahteraan sosial.

Instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki potensi yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan sosial. Optimalisasi pengelolaan instrumen tersebut dapat memperkuat pemerataan kesejahteraan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kebijakan pembangunan nasional dan penerapan instrumen ekonomi Islam agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat mensejahterakan umat. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas penerapan instrumen ekonomi Islam secara empiris dalam mengurangi ketimpangan sosial di berbagai daerah maupun negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afsar, M. A., Sejati, M. I., Islam, U., & Alauddin, N. (2025). *ISLAMIC ECONOMICS AS A SOLUTION TO ECONOMIC GROWTH INEQUALITY IN INDONESIA : A MACRO DATA STUDY 2010 – 2024 EKONOMI ISLAM SEBAGAI SOLUSI ATAS KETIMPANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA : STUDI DATA MAKRO 2010-2024*. 2(3), 395–407.
- Ali, B., Primayani, D. F., & Putri, R. M. (2025). Problematika Ketimpangan Sosial di Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan Yang Solutif. *Legal System Journal*, 2(1), 13–22.
- Alvarets, M. R. (2023). *MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat) LAMPUNG 1445 H / 2023 M MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat) 1445 H / 2023 M*.
- Arbians Ifan, Bahtiar Yusuf, & Sisdianto Ersi. (2025). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Ekonomi Di Indonesiadalamperspektifekonomiislam*. 9.
- Aspiah, H., & Rahman, T. (2026). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi , pengeluaran pemerintah dan tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan 10 provinsi di indonesia ditinjau dari perspektif ekonomi islam tahun 2020-2024*. 4(4), 9181–9191.
- Chalid, F. I., & Zubaidah, S. (2025). Komparasi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam. *Musarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 5(1), 54–65. <https://doi.org/10.24269/mjse.v5i1.11829>
- Damara, R. D. (2024). *ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN PROVINSI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Tahun Periode 2019-2023)*.

- Edison, & Andriansyah, M. (2023). 323-Article Text-1001-2-10-20231227. *Jurnal Development*, 11(2), 134–147.
- Ekawaty, M., & Jumiyanti, K. (2025). Ekonomi Islam dan Keadilan Sosial dalam Implementasi Sistem Ekonomi Syariah Mengurangi Ketimpangan Sosial di Negara Berkembang: Tinjauan Sistematis. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 297–328. <https://doi.org/10.24090/ej.v13i2.14930>
- Hernovianty, F. R., Pratiwi, N. N., & Adventia, D. (2022). Analisis ketimpangan sosial wilayah di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 17(1), 212. <https://doi.org/10.20961/region.v17i1.50815>
- Irawan, A. D., & Sulisty, A. Q. P. (2022). Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial. *Citizenship Virtues*, 2(1), 251–262.
- Kamila Majazeta Mutiara Maharani. (2024). 1158-Article Text-5900-1-10-20240101. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 3, 1328–1337.
- Maghfiroh, F. (2026). *Ketimpangan sosial sebagai mekanisme reproduksi kekuasaan dalam struktur masyarakat modern*. 15(01), 95–105.
- Muh. Watif, Aulya Ramadhani.JT, Jumiati, Luthfiah Syam Almazini Tahir, & Nurul Hikmah. (2024). Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan Pada Masyarakat Perkotaan. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(4), 536–547. <https://doi.org/10.56799/peshum.v3i4.3811>
- Sari, P. H., & Santoso, R. P. (2025). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di Indonesia periode 2012-2023. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 3(2), 220–226. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol3.iss2.art12>
- Syahrin, M. A., Luayyin, R. H., Arifin, M., & Hidayat, R. (2022). Pemerataan Distribusi Untuk Menanggulangi Kesenjangan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 1(1), 38–49. <https://doi.org/10.46773/v1i1.252>
- Taufikur Rahman, Baiq Saripta Wijimulawiani, & Ali Akbar Hidayat. (2025). Analisis Pengaruh Nilai Ekspor, Utang Luar Negeri dan Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2010–2024. *Economic Reviews Journal*, 4(2), 779–796. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i2.724>
- Zulfialdi, M. F., & Sulhan, M. (2023). JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 7(2), 1346–1352.